

**PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PNPM)
MANDIRI DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU**

Rahmat Kaco¹, Hasanuddin Haruna²

^{1,2}STIE Muhammadiyah Mamuju

¹Email: rakatutar1973@gmail.com

²Email: acang.haruna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju. Di mana di dalamnya terdapat para aparatur pemerintah dan PNPM mandiri yang memiliki fungsi, tugas serta tanggung jawab yang sangat penting dalam proses peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju., dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Dengan adanya program PNPM Mandiri secara umum akan memperbaiki atau memaksimalkan sumber daya manusia dari para pelaku PNPM Mandiri yang bertujuan untuk memberikan bayangan atau menciptakan masyarakat – masyarakat yang berkompeten dan berguna bagi keberlanjutan dari program-program PNPM Mandiri berikutnya. Partisipasi masyarakat Hal yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan program dari PNPM Mandiri dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi masyarakat di dalam ruang lingkup kelurahan itu sendiri. Jika tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi maka, tingkat keberhasilan program tersebut akan tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Dalam kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan taroada guna menyukseskan program PNPM Mandiri sangat tinggi, oleh karena itu program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pembangunan, Masyarakat, Mandiri, Mamuju

Abstarct

This research was conducted in Kalukku Village, Mamuju Regency. The purpose of this study was to determine the role of the independent National Community Empowerment Program (PNPM) in Kalukku Village, Mamuju Regency, and to determine the driving and inhibiting factors of the independent National Community Empowerment Program (PNPM) in Kalukku Village, Mamuju Regency. The results obtained in this study are With the existence of the PNPM Mandiri program in general, it will improve or maximize the human resources of the PNPM Mandiri actors which aims to provide shadows or create competent and independent communities. people who are competent and useful for the sustainability of the next PNPM Mandiri programs. Community participation What is meant here is that the success of the PNPM Mandiri program is directly influenced by the level of community participation within the village itself. If the level of community participation is high then the level of success of the program will also be high. And vice versa. In reality, the level of community participation in Taroada Village to succeed the PNPM Mandiri program is very high, therefore the program can run according to plan.

Keywords: Empowerment, Development, Community, Independent, Mamuju

1. Pendahuluan

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Paradigma “pemberdayaan” memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagaman Bangsa Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralistik dalam pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan

yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka berperan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan Program

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerahdaerahterpencil dan terisolir. Sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini mulai memusatkan kegiatannya di wilayah perdesaan yakni PNPM Mandiri Perdesaan . Dalam PNPM Mandiri Perdesaan seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahap kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan prioritas di desa masing-masing hingga pelaksanaan dan pemeliharannya. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai salah satu upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan , serta

cakupan pembangunan diharapkan dapat berpihak pada masyarakat miskin dan upaya meningkatkan kesetaraan jender. Dampak signifikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat terlihat dari kenaikan belanja rumah tangga perdesaan. Fenomena ini merupakan hasil studiyang telah dilakukan di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang menunjukkan adanya peningkatan belanja rumah tangga yang cukup besar dibandingkan kecamatan non-program. Selanjutnya semakin lama sebuah kecamatan menerima bantuan program, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan belanja rumah tangga perdesaan. Berbicara mengenai suatu program tentu saja memiliki sisi kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan kompleks yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Walaupun telah terbukti beberapa daerah telah berhasil, namun masih ada saja daerah yang mengalami masalah. Baik dari segi perencanaan, maupun efektivitas pelaksanaannya. Bertolak dari latar belakang lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan PNPM Mandiri dalam peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di daerah. Dengan mengangkat judul penelitian “*Peran program PNPM Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju*”. Sebagai pijakan awal dari sebuah penalaran

lebih lanjut menuju sebuah pembangunan di daerah yang lebih memperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya

2. Kajian Pustaka

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenannya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Adi (2008 : 77), pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan

manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai

orang yang memiliki keberagam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Menurut Dadang S. Suharmawijaya : ”inovasi program pemberdayaan ekonomi merupakan upaya mengatasi persoalan ekonomi masyarakat komunitas tertentu. Hanya, pada perjalanannya, yang memiliki problem ekonomi merupakan kelompok masyarakat miskin. Kenyataan itulah yang menjadikan sebagian program kabupaten/kota menyatukan antara pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.” Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampi menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Konsep Program PNPM Mandiri

PNPM Mandiri ialah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DKT) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya dan PPIP yang biasa disebut dengan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri sampai 2008 juga masih diprioritas pada desa-desa tertinggal.

Secara umum, tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dan secara khusus dapat diatur sebagai berikut;

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemen, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Dasar peraturan perundangan sistem yang digunakan adalah:

- 1) UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
- 3) PP No. 73 Tahun 2005 tentang Keluruhan.
- 4) PP No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan.

2. Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan pembangunan

terkait:

- 1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- 2) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional 2004-2009.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan peminjaman dari Bank Dunia. PNPM Mandiri Pedesaan dirancang oleh pemerintah dalam beberapa bentuk yang diantaranya dalam pelaksanaan program fisik melalui pembangunan sarana, prasarana dan program ekonomi melalui kegiatan koperasi serta bantuan ekonomi lain yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat di daerah-daerah pelosok, khususnya daerah tertinggal. Dalam penelitian ini diuraikan terperinci beberapa efektivitas dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Nita.

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program nasional yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa, terutama masyarakat miskin desa dan masyarakat pengangguran desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program adalah indikator utama yang digunakan dalam menganalisis efektif tidaknya pelaksanaan program. Rangkaian program PNPM Mandiri Pedesaan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah memulai dari (1) proses perencanaan program kegiatan yang dianggap cocok ditetapkan di desa, (2) proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, dan (3) proses pengawasan kegiatannya. Seluruh rangkaian program PNPM Mandiri Perdesaan ini secara ideal harus dapat memberdayakan masyarakat sebagai pelaksana utamanya. Dari beberapa program PNPM Mandiri yang dirumuskan dalam peningkatan prasarana kehidupan masyarakat di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju. Penelitian ini hanya terfokus pada program perbaikan prasarana infrastruktur jalan tani dan pembangunan atau pembuatan jamban gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju. Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah anatar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang ada dan upaya pelestarian kegiatan. Pelaksanaan pengalokasian dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM). PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007)

dan PNPM-PPK (2007). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal tiap daerah, dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelakupelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 2 jenis kegiatan yang meliputi:

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- 2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan.

Tinjauan tentang masyarakat

Menurut Sufyanto (2001 : 41) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas,

kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi. Masyarakat juga disebut sebagai society dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah orang-orang yang berada dalam satu daerah.

Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai Menurut Soetomo (2011 : 93) memberi pengertian bahwa masyarakat ialah kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu. Sedangkan, menurut Sani (2000 : 74) masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain. Masyarakat terbentuk dalam

3. Metode Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju. Di mana di dalamnya terdapat para aparatur

keragaman adalah sebagai ketentuan dari Allah, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan social dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu. Di dalam masyarakat ada pula yang disebut dengan masyarakat aktif adalah masyarakat yang menguasai dunia sosial mereka, masyarakat pasif adalah masyarakat adalah kelompok masyarakat yang anggotanya kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan aktif lainnya. menurut Culla (2002 : 132) dalam masyarakat aktif orang dapat mengubah hukum-hukum sosialnya. Etzioni melihat masyarakat sebagai sekumpulan sub-sub kolektiva, atau sub-sub kelompok yang longgar. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah diberi kesimpulan bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan ialah sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu

pemerintah dan PNPM mandiri yang memiliki fungsi, tugas serta tanggung jawab yang sangat penting dalam proses peningkatan prasarana

kehidupan masyarakat di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju. Jenis data dari penelitian ini ada dua yaitu Data Kualitatif, data yang diperoleh dari kelurahan Kalukku berupa informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari kelurahan Kalukku dalam bentuk tabel. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dan bersumber langsung dari obyek penelitian. Dan data sekunder, yaitu data yang di olah dari dokumen-dokumen. atau laporan-laporan tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa itu bias direkam. Didengarkan , dirasakan yang kemudian dicatat secara obyektif. Observasi terkait dengan judul yang akan diteliti adalah Peranan Program Nasional Pemberdayaan

4. Hasil dan Pembahasan

Program PNPM Mandiri Dalam Pembangunan di Kelurahan Kalukku.

Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri dalam Pembangunan di Kelurahan Kalukku pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dalam artian peningkatan Pembangunan di

Masyarakat (PNPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju.

2. Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden . komunikasi berlangsung dalam bentuk tatap muka dan Tanya jawab , sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata secara verbal. Wawancara dilakukan secara mendalam mengenai penelitian yang dimaksud, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.(Arikunto 2006 : 84)

Kelurahan Kalukku yang secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat , meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, memberi kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengangkutan hasil produksi pertanian melalui salah satu program kerja PNPM Mandiri yakni

perbaikan infrastruktur jalan tani (fisik). Serta , memperbaiki kesejahteraan masyarakat (kesehatan masyarakat) melalui program kerja PNPM Mandiri yakni Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal itu tertuang di dalam prinsip – prinsip pokok PNPM Mandiri yang terdiri dari :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan di pertanggung jawabkan, baik secara moral, teknis, maupun administratif.
2. **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
3. **Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
4. **Otonomi.** Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
5. **Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap

proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

6. **Prioritas Usulan.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyakbanyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
7. **Kesetaraan dan Keadilan Gender.** Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap. pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
8. **Kolaborasi.** Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
9. **Keberlanjutan.** Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri juga memiliki prinsip lainnya , sebagaimana di utarakan oleh M. Natsir S,Sos selaku Lurah Kelurahan Kalukku , yakni :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. Agar tujuan umum dari PNPM Mandiri seperti meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang ada di Kelurahan. Serta sejalan dengan visi dan misi dari PNPM itu sendiri, adapun visi misi PNPM yang dikemukakan oleh Lurah Kelurahan Kalukku. M. Natsir S, Sos di kediaman beliau sebagai berikut: **Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin .** **”(wawancara 8 oktober 2016).** Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Proses Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dalam rangka proses peningkatan pembangunan di Kelurahan Kalukku melalui program PNPM Mandiri strategi yang digunakan adalah menjaring aspirasi masyarakat dan peningkatan pembangunan dalam artian perbaikan infrastruktur jalan tali dan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu di sekitar Kelurahan Kalukku sebagai target atau sasaran utama. Adapun sasaran yang lain adalah menguatkan system pembangunan partisipatif masyarakat, untuk melakukan kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri dengan memperhatikan jenis usulan agar yang diusulkan atau diajukan bisa didanai atau dapat direalisasikan oleh program itu sendiri, karena kegiatan masyarakat yang diusulkan juga bisa ditolak atau tidak diterima dan tidak bisa didanai oleh PNPM Mandiri. Adapun usulan kegiatan yang dapat didanai atau diterima dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Kalukku dapat diklasifikasikan atas dua jenis kegiatan meliputi:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana (perbaikan infrastruktur jalan tali) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat di sekitar Kelurahan Kalukku.

2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan (pembangunan jamban sehat) bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di sekitar Kelurahan Kalukku.

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, didukung sumberdaya yang ada, dan upaya pelestarian kegiatan, pembangunan yang dipilih harus

mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kalukku dalam bidang kesehatan dan prasarana kehidupan. PNPM tidak diperbolehkan untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar larangan (*negative list*). Pelarangan ini didasarkan atas komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin. PNPM-MP memiliki tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kelurahan Kalukku **Bapak Muh. Natsir S,Sos** yang menyatakan bahwa :

“Program PNPM Mandiri ini sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki masalah

pembangunan yang ada di Kelurahan ini, akan tetapi ada hal di samping itu yang lebih penting yaitu menarik perhatian dari masyarakat agar sekiranya dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan melalui penyaluran aspirasi mereka secara langsung.” (*wawancara, 8 oktober 2016*).

Jika dilihat dari kondisi jalan dan jamban masyarakat yang kurang mampu, sudah sewajarnya pemerintah melalui PNPM Mandiri meluncurkan program yang berhubungan dengan perbaikan pembangunan di kelurahan Kalukku guna terciptanya peningkatan prasarana kehidupan di Kelurahan Kalukku. Sebagai langkah dari keseriusan dari masyarakat dan pemerintah beberapa tokoh masyarakat bersama ketua PNPM Mandiri Kelurahan Kalukku beserta staff Kelurahan Kalukku mengadakan pertemuan yang membahas mengenai masalah perbaikan prasarana yang mencakup dua hal yaitu, perbaikan jalan tani dan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan akhirnya setelah mereka sepakat, kemudian dimulai lah program dari PNPM Mandiri ini di kelurahan Kalukku yang murni merupakan aspirasi dari masyarakat. Hal ini sebagaimana dengan yang dikemukakan oleh Ketua PNPM Mandiri **Bapak H.Muh.Ramli**, mengatakan bahwa :

“ rencana perbaikan pembangunan di Kelurahan Kalukku ini munculnya dari masyarakat setempat, yang kemudian mengadakan pertemuan guna membahas masalah perbaikan jalan tani dan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Terlaksananya program ini tidak terlepas dari peran masyarakat dan pemerintah yang saling bekerja sama dalam menyatukan aspirasi yang kemudian di wadah oleh PNPM mandiri” (**wawancara 8 Oktober 2016**).

“sudah sejak lama kami menginginkan adanya hal seperti ini dimana pemerintah dan masyarakat setempat mau bahu membahu dalam tercapainya sebuah kesejahteraan yang dalam artian lain kesejahteraan yang dimaksud adalah adanya peningkatan pembangunan di Kelurahan Kalukku ini” (**wawancara 9 oktober 2016**)

Program PNPM Mandiri yang ada di Kelurahan Kalukku terpusat kepada pembangunan prasarana yang bersifat fisik. Karena , di kelurahan Kalukku yang harus di utamakan yaitu pembangunannya di mana jalan dan prasarana prasarana yang ada belum memadai. Oleh karena itu program PNPM Mandiri di kelurahan Kalukku ini memiliki presentasemencapai 100 % untuk pembangunan fisik (prasarana). Sedangkan, untuk yang non fisik belum ada sama sekali.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM mandiri di Kelurahan Kalukku

Pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalukku Kabupaten Mamuju dalam tujuan meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Kalukku mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal.

“salah satu faktor penting yang membuat program PNPM Mandiri ini dapat terlaksana sesuai dengan target yang kita inginkan adalah adanya bentuk partisipasi dari masyarakat yang sangat membantu dan memadai. Serta saya juga merasa kagum kepada masyarakat di sekitar kelurahan Kalukku yang begitu ingin mencapai suatu kemajuan yang signifikan” (**wawancara 28 september 2016**). Sedangkan, menurut salah satu masyarakat setempat **Bapak Muhammad Noordin** yang mengemukakan bahwa:

“dengan adanya program PNPM Mandiri yang sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari harinya, inilah saatnya kami membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama. Melalui program ini kami selaku masyarakat tidak akan segan dalam memberikan bantuan selama bantuan itu masih bias kami lakukan” (**wawancara 9 oktober 2016**).

Dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh para responden mereka semua sependapat

bahwa kehadiran program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalukku memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat di kelurahan Kalukku itu sendiri. Di samping itu mereka semua juga telah berusaha untuk bekerja sama sebaik mungkin, hal itu terlihat dari bentuk partisipasi mereka yang tidak segan untuk memberikan bantuan yang signifikan guna terlancarkannya program PNPM Mandiri yang mencakup 2 hal yaitu, perbaikan jalan tani serta pembangunan jamban sehat keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu.

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemeliharaan Hasil

Program PNPM Mandiri akhirnya menjadi acuan bagi masyarakat sekitar Kelurahan Kalukku guna menuju ke kehidupan yang lebih baik, di era modernisasi ini apabila seseorang atau sekumpulan orang tidak mampu bersaing dengan yang lain maka, hanya 1 hal yang akan di peroleh yaitu ketertinggalan nyata. Sedangkan, dengan adanya PNPM Mandiri di Kelurahan Kalukku senantiasa memberikan kesadaran diri bagi masyarakat yang dulunya bersikap acuh tak acuh kini sudah mulai mau saling bekerja sama untuk mencapai suatu kemajuan yang signifikan. Seperti yang di utarakan salah satu tokoh masyarakat setempat yaitu **Bapak Mude'** yang mengemukakan bahwa :

“program PNPM Mandiri telah terlaksana dan sukses, kini saatnya bagi kita untuk merawat dan memelihara apa yang telah kita dambakan dalam beberap tahun yang lalu. Tidak akan ada hal yang bertahan abadi, tapi setidaknya mari kita usahakan agar hal tersebut bias menjadi lebih tahan lama. Apalagi tidak ada salahnya kan kalau kita salingmembantu untuk kebaikan kita bersama” (**wawancara 9 oktober 2016**). Di samping itu, salah satu staff kelurahan yaitu **Ibu St. Rohmiati** mengemukakan bahwa :

“program PNPM Mandiri merupakan suatu berkah bagi masyarakat di kelurahan Kalukku, karena dengan adanya PNPM ini masyarakat asli Kelurahan Kalukku yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dapat memperoleh kemudahan dalam proses b pengangkutan hasil produksi serta memberikan banyak manfaat yang lain bagi masyarakat kelurahan kalukku” (**wawancara 9 oktober 2016**).

Efektivitas program PNPM Mandiri dalam pembangunan di Kelurahan Kalukku

Program PNPM Mandiri adalah program yang sangat membantu bagi kehidupan masyarakat golongan kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu program – program yang dikeluarkan oleh PNPM Mandiri harus lah efektif dan mengenai sasaran atau target yang ingin di capai.

Harga tanah di sekitar area persawahan itu melambung tinggi. Di tambah lagi dengan adanya perumahan yang dibangun di sekitar lokasi persawahan itu sendiri. Sehingga terciptalah suatu kondisi di mana harga tanah dari para pemilik tanah di sekitar lokasi persawahan tersebut menjadi incaran para pebisnis, tentunya bukan dengan harga yang murah. Berikut ini adalah salah satu argument dari salah satu tokoh masyarakat yang bermukim di sekitar area persawahan tersebut, yaitu **Bapak Rijal**, yang mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya perbaikan jalan yang menghubungkan antara jalan poros – persawahan sangat memudahkan kami yang bermukim di area tersebut, di samping itu, perbaikan jalan tersebut juga telah memberikan dampak positif, misalnya harga tanah yang melambung. Dengan demikian, masyarakat di sini tentunya dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal” (wawancara 10 oktober 2016).

Faktor faktor yang mempengaruhi program PNPM Mandiri

Di dalam sebuah program kerja atau kegiatan tentunya ada faktor - faktor yang mendorong dan ada pula faktor -faktor yang menghambat. Hal inilah yang akan kita ketahui bersama. Di mana kita mulai dengan faktor - faktor yang mendorong program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalukku :

Faktor – faktor yang mendukung program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalukku

Adanya sosialisasi program PNPM Mandiri Maksudnya di sini adalah dengan adanya sosialisasi tentang program PNPM Mandiri yang akan dilaksanakan tentunya akan memberi kejelasan kepada masyarakat tentang hal – hal apa saja yang akan di benahi oleh pemerintah melalui program PNPM Mandiri. Karena salah satu prinsip dasar dalam PNPM Mandiri adalah “keterbukaan”. Apabila dalam suatu proses pelaksanaan program tidak ada yang namanya keterbukaan maka akan diragukan tingkat efektivitas serta keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan tersebut. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kelancaran dan kesuksesan dari program tersebut dalam hal efektifitas dari program itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu **Ibu Sudriana** mengemukakan bahwa: “program PNPM Mandiri sudah sewajarnya mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Di lain hal, dengan adanya sosialisasi program PNPM Mandiri yang ingin di laksanakan akan lebih memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah.” (wawancara 11 oktober 2016).

Faktor – faktor penghambat program PNPM Mandiri di kelurahan Kalukku

- Faktor dana (keuangan)

Di dalam suatu program yang ingin dijalankan permasalahan dana yang selalu muncul sebagai musuh utama. Di dalam program PNPM Mandiri hal itu kembali muncul dan menciptakan suasana di mana dana yang semestinya sudah cair nyatanya terlambat. Nah, hal ini lah yang menyulitkan program ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Di Negara kita ini sudah sering terjadi di mana suatu program dari pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat akhirnya kembali mendapatkan kesulitan dalam hal atau masalah dana yang seringkali terlambat atau bermasalah. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran dari pemerintah akan begitu pentingnya program yang membutuhkan dana tepat waktu guna tercapainya hasil yang diinginkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah demi kesejahteraan rakyat semata. Oleh karena itu seharusnya pemerintah berkaca dalam berbagai kejadian yang sama yang terjadi bertahun tahun lalu demi terciptanya kesejahteraan dan tercapainya suatu hal yang dinamakan efektivitas. Berikut pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat yaitu **Bapak Mochtar Dg.Sibali** yang mengemukakan bahwa :

“ Bukan Indonesia namanya kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Apalagi yang dibahas di sini mengenai masalah dana yang

menggiurkan bagi kalangan atas yang terkait.”

(**Wawancara 2 Oktober 2016**)

● **Masalah musim penghujan**

Yang dimaksud dalam hal ini adalah program PNPM Mandiri di Kelurahan kalukku sempat mengalami kemogokan karena musim yang tidak mau bersahabat. Seperti yang kita ketahui bersama membangun dengan hujan sebagai gangguan sama saja dengan menghancurkan bangunan itu sendiri. Maka , tidak ada jalan lain program ini sempatterhambat selama sebulan gara – gara hujan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kelalaian dari pemerintah setempat selaku pelaksana program yang memulai suatu program pembangunan yang berbaur fisik dalam periode musim penghujan yakni bulan oktober dan November yang notabene merupakan waktu hujan. Seharusnya , Pemerintah lebih jeli dalam masalah penentuan waktu pelaksanaan agar tidak terjadi hal – hal yang dapat menghambat program PNPM Mandiri ini yang bertujuan meningkatkan pembangunan di kelurahan kalukku Kabupaten Mamuju Hal itu di lengkapi dengan penjelasan dari ketua PNPM Mandiri kelurahan Kalukku, yaitu **Bapak H.Muh. Ramli** yang mengemukakan bahwa:

“ musim penghujan merupakan salah satu hambatan tersendiri bagi kelancaran program PNPM Mandiri ini. Oleh karena itu kami hanya bisa bersabar dalam menghadapi hambatan ini.

Tapi intinya program ini tetap berjalan sesuai rencana meskipun agak molor waktu pelaksanaannya.” (**wawancara 10 oktober 2016**).

Seperti yang di lihat di atas, hal itulah yang tergolong di dalam faktor– faktor yang menunjang tersukseskannya program PNPM Mandiri dan faktor – faktor yang menghambat jalannya program dari PNPM Mandiri ini. Namun . seperti yang kita ketahui bersama hal itu dapat berjalan lancar namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terlaksananya program PNPM Mandiri di

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pada BAB IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : PNPM Mandiri merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberantas masalah kemiskinan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri dalam meningkatkan prasarana kehidupan di Kelurahan Kalukku pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dalam artian peningkatan pembangunan di Kelurahan Kalukku yang secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat , meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, memberi

Kelurahan Kalukku harusnyamenjadi cerminan bagi kita semua , di mana meskipun terkendala oleh keterlambatan pencairan dana serta kesalahan pemilihan waktu pelaksanaan, namun, program ini dapat berjalan lancar dan berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi kelangsungan kehidupan di Kelurahan Kalukku dan sekitarnya. Dengan adanya kemauan dari Pemerintah dan masyarakat setempat yang saling bahu membahu dalam tersukseskannya program dari PNPM Mandiri ini, maka semua hambatan tidak akan menjadi sebuah masalah yang berarti.

kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengangkutan hasil produksi pertanian melalui salah satu program kerja PNPM Mandiri yakni perbaikan infrastruktur jalan tani (fisik). Serta , memperbaiki kesejahteraan masyarakat (kesehatan masyarakat) melalui program kerja PNPM Mandiri yakni Pembangunan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun faktor – faktor yang mendorong program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalukku , adalah :

Adanya sosialisasi program PNPM Mandiri Maksudnya di sini adalah dengan adanya sosialisasi tentang program PNPM Mandiri yang akan dilaksanakan tentunya akan member kejelasan kepada masyarakat tentang hal – hal apa saja yang akan di benahi oleh

pemerintah melalui program PNPM Mandiri. Karena salah satu prinsip dasar dalam PNPM Mandiri adalah “keterbukaan”. SDM (sumber daya manusia) sebagai pelaku PNPM Mandiri. Dengan adanya program PNPM Mandiri secara umum akan memperbaiki atau memaksimalkan sumber daya manusia dari para pelaku PNPM Mandiri yang bertujuan untuk memberikan bayangan atau menciptakan masyarakat – masyarakat yang berkompeten dan berguna bagi keberlanjutan dari program-program PNPM Mandiri berikutnya. Partisipasi masyarakat Hal yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan program dari PNPM Mandiri dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi masyarakat di dalam ruang lingkup kelurahan itu sendiri. Jika tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi maka, tingkat keberhasilan program tersebut akan tinggi pula. Begitu pula sebaliknya. Dalam kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat di kelurahan taroda gunamenyuksekan program PNPM Mandiri sangat tinggi, oleh karena itu program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan, adapun faktor – faktor yang menghambat program PNPM Mandiri adalah:

- Faktor dana (keuangan)

Di dalam suatu program yang ingin dijalankan permasalahan dana yang selalu muncul sebagai musuh utama. Di dalam program PNPM

Mandiri hal itu kembali muncul dan menciptakan suasana di mana dana yang semestinya sudah cair nyatanya terlambat. Nah, hal ini lah yang menyulitkan program ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

- Masalah musim penghujan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah program PNPM Mandiri di Kelurahan Kalukku sempat mengalami kemogokan karena musim yang tidak mau bersahabat. Seperti yang kita ketahui bersama membangun dengan hujan sebagai gangguan sama saja dengan menghancurkan bangunan itu sendiri. Maka, tidak ada jalan lain program ini sempat terhambat selama sebulan gara – gara hujan.

Berdasarkan keimpulan dari penelitian dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Untuk penyelenggaraan program PNPM selanjutnya seharusnya perlu perhatian yang lebih dari pemerintah di mana proses pengaliran dananya tersalurkan dengan benar dan tepat waktu.
2. Saran bagi pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya di kelurahan Kalukku seharusnya menyertakan beberapa proses pemberdayaan masyarakat di dalam program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di kelurahan Kalukku. Contoh, pemberian keterampilan bagi IRT untuk digunakan

sebagai bekal dalam membuka suatu usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

3. Program PNPM mandiri di kelurahan Kalukku ini seharusnya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. Jangan hanya berpusat kepada program fisik, melainkan juga harus ke program yang bersifat non fisik.

Daftar Pustaka

Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Press

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Culla, Adi Suryadi.,2002, *Masyarakat Madani: Pemikiran,Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Sani, M.Y. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan*. Laboratorium Pembangunan Masyarakat. Program Pascasarjana UNHAS. Makassar.

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & LP2IF

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor **12 Tahun 2008** Tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor **23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah

Undang No **20 Tahun 2008** Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Pemerintah Nomor **41 Tahun 2007** tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor **38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.